

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BPR BKK DEMAK PERSERODA KABUPATEN
DEMAK
TAHUN 2025**



**Jl. Raya Demak-Kudus RT 005 RW 009 Kel. Bintoro, Kec. Demak,
Kab. Demak
TELEPON: (0291) 685961**



1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	PT BPR BKK DEMAK Perseroda Kabupaten Demak
Alamat	Jalan Raya Demak- Kudus RT 05 RW 09, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak
Nomor Telepon	(0291) 685961

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG-Good Corporate Governance) pada PT BPR BKK DEMAK Perseroda Kabupaten Demak tahun 2025 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR mengalami penurunan seiring dengan adanya penurunan kinerja BPR, dikarenakan adanya tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2025 di tengah kondisi perekonomian dan sektor usaha yang belum pulih. PT BPR BKK DEMAK Perseroda Kabupaten Demak memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga PT BPR BKK DEMAK Perseroda Kabupaten Demak dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di Kabupaten Demak.

Dengan penerapan Tata Kelola yang baik, PT BPR BKK DEMAK Perseroda Kabupaten Demak secara berkesinambungan dan didukung integritas serta komitmen tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ Bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam penerapan Tata Kelola di lingkungan PT BPR BKK DEMAK Perseroda Kabupaten Demak.

PT BPR BKK DEMAK Perseroda Kabupaten Demak senantiasa menerapkan prinsip Tata Kelola yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai visi, yaitu menjadi BPR yang memiliki reputasi kualitas pelayanan baik, sehat, aman, dipercaya dan cepat dalam melayani seluruh lapisan masyarakat.

Dalam penerapan Tata Kelola, PT BPR BKK DEMAK Perseroda Kabupaten Demak mengacu pada 3 (tiga) aspek yaitu Struktur, Proses, dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek tersebut menjadi intisari dan fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi seluruh pemangku kepentingan.

Selama tahun 2025, PT BPR BKK DEMAK Perseroda Kabupaten Demak selalu berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang secara konsisten dan berkelanjutan.

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola	
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	3. Cukup Baik

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik.



Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR. Tata Kelola dengan peringkat 3 (cukup memadai) dengan terdapat beberapa poin yang harus mendapat perhatian manajemen diantaranya :

- Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan pencapaian masih terpenuhi sebagian.
- BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Direksi namun kurang memadai sampai dengan bulan laporan.
- BPR belum dapat mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite yang kurang memadai dikarenakan belum terdapat komite audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi.
- Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern, yaitu BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, pada BPR dinilai masih kurang memadai.
- Terdapat beberapa ketentuan terkait struktur dan infrastruktur tata kelola yang harus ditindaklanjuti antara lain :
 1. BPR wajib memiliki paling sedikit 3 anggota Direksi dan Dekom (50% diantaranya komisaris independen). Saat ini BPR hanya memiliki 2 direksi dan tidak mempunyai komisaris independen.
 2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib tidak berkaitan dengan pengambilan keputusan operasional pada kegiatan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan operasional lain sehingga struktur organisasi BPR harus dilakukan penyesuaian.
 3. Dekom wajib membentuk paling sedikit komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1.	Nama	Sunoto, S.Kom.
	Jabatan	Direktur Utama dan Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	NIK	3321030607700005
Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:		
1. mengkoordinir tugas-tugas Direktur 2. memantau perkembangan lingkungan khususnya perkembangan industri perbankan; 3. melakukan negosiasi dan membuat kesepakatan- kesepakatan dengan pihak ketiga yang sesuai/berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya; 4. melakukan penilaian terhadap prestasi kerja bawahan; 5. melakukan inovasi dan perbaikan baik dalam organisasi maupun operasional sehingga meningkatkan pertumbuhan bank; 6. menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan termasuk kebijakan gaji, tunjangan pegawai, kebijakan kredit, tarif dan lain-lain; 7. menyetujui pengeluaran biaya sesuai batas kewenangannya;		



8. menetapkan suku bunga bank termasuk perubahannya;
9. mengangkat, memberhentikan, promosi, mutasi dan demosi pegawai;
10. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya berkaitan dengan peraturan perbankan;
11. memimpin dan mengendalikan operasional perusahaan agar dapat melayani kebutuhan organisasi dan pelanggan dengan baik;
12. mengkoordinasi penyusunan program kerja operasional secara keseluruhan dan rencana jangka panjang;
13. menyusun pedoman dan tata tertib kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat;
14. melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Instansi lain dan jajaran intern bank;
15. mendorong dan mengusulkan peningkatan kesejahteraan pegawai dan tenaga kerja yang bekerja diperusahaan dan mempertimbangkan reward dan punishment;
16. mengusulkan kebijakan kepegawaian termasuk kedisiplinan pegawai, gaji, pensiun dan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. mengembangkan ketrampilan pegawai, memotivasi pegawai dan menyelesaikan permasalahan kepegawaian;
18. merumuskan anggaran Perusahaan setelah berkoordinasi dengan Direktur;
19. memonitor realisasi biaya berdasarkan program kerja dan anggaran perusahaan;
20. mengkoordinir pengadaan, pengelolaan, pengamanan fasilitas dan peralatan perusahaan;
21. memantau tentang kebersihan dan ketertiban penggunaan fasilitas dan lain-lain;
22. menjaga likuiditas dan ketersediaan alat-alat likuid serta menyimpan di tempat yang aman;
23. mengembangkan teknologi informasi dan pemutakhiran alat kerja sehingga lebih produktif, efektif, dan efisien;
24. menyusun dan menyampaikan laporan-laporan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkompeten;
25. apabila Direktur Utama dan yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak berada di kantor, Direktur dapat mewakili sementara waktu;
26. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPR dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko BPR;
27. Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank, dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko yang ditetapkan, serta memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan;
28. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan exposure risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Manajemen Risiko, Pejabat Eksekutif yang Melaksanakan Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Penanggung Jawab Program APU PPT & PPPSPM;
29. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat Bank satu tingkat dibawah Direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal yang berlaku;
30. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi,



antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif;

31. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara unit manajemen risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan unit kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi;

2.	Nama	Sutopo, S.Sos. M.M.
	Jabatan	Direktur
	NIK	3309150701640002

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

1. Menetapkan sasaran dan mengkoordinasikan pelaksanaan bidang pemasaran, perkreditan, pengolahan dana serta pengawasan kredit;
2. Mengkoordinasi penyusunan rencana usaha secara keseluruhan baik rencana jangka pendek maupun rencana jangka panjang;
3. Memonitor perkembangan lingkungan khususnya keinginan pasar terhadap produk dan jasa baru, meningkatkan mutu pelayanan dan perkembangan sarana teknologi lainnya;
4. Memonitor perkembangan suku bunga bank, menganalisis dan mengusulkan perubahannya; dan
5. Memonitor dan melakukan tindak lanjut hasil kerja Bidang pemasaran di Kantor Pusat Operasional dan Kantor Cabang.
6. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama dan Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan;
7. Direktur membawahi Kredit, Dana, serta aktivitas pemasaran di Kantor Cabang/ Kantor Pusat Operasional;
8. Direktur mengkoordinasi fungsinya pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang;
9. Memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional BPR dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko BPR;
10. Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per aktivitas fungsional Bank, dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko yang ditetapkan, serta memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan;
11. Menetapkan sasaran dan mengkoordinasikan pelaksanaan bidang pemasaran, perkreditan, pengolahan dana serta pengawasan kredit;
12. Memonitor perkembangan lingkungan khususnya keinginan pasar terhadap produk dan jasa baru, meningkatkan mutu pelayanan dan perkembangan sarana teknologi lainnya;
13. Memonitor perkembangan suku bunga bank, menganalisis dan mengusulkan perubahannya;
14. Memonitor dan melakukan tindak lanjut hasil kerja Bidang pemasaran di Kantor Pusat Operasional dan Kantor Cabang;

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:



- a. Direksi berserta PE untuk mempersiapkan diberlakukannya CKPN serta mengupayakan penyelesaian CKPN salah satunya yaitu dengan cara penghapusan Hutang (PH) harus dilakukan secara selektif serta dilakukan sosialisasi dan pembinaan kepala seksi pemasaran samapai AO terkait regulasi seperti CKPN;
- b. Menerapkan Strategi Anti Fraud (SAF) pada semua unit kerja, serta terus mensosialisaikan terkait risiko dan bahaya fraud terkait risiko kerugian bahkan sampai ke risiko reputasi bank atau kepercayaan nasabah terhadap PT BPR BKK DEMAK Perseroda Kabupaten Demak;
- c. Direksi agar segera menindaklanjuti semua komitmen Laporan Hasil Pemeriksaan Umum OJK tepat waktu.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1.	Nama	Wahyu Jaya Sembodo, S.E, M.M.
	Jabatan	Komisaris Utama
	NIK	3374010202690001
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: a. Memimpin kegiatan anggota Dewan Komisaris; b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemegang Saham; c. Memimpin rapat Dewan Komisaris; d. Menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Komisaris; e. Wajib memastikan terselenggaranya penetapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; f. Wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; g. Wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; h. Wajib memberitahukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/ atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.	

2.	Nama	Arief Sudaryanto, S.Sos., M.Si
	Jabatan	Komisaris
	NIK	3321111805700003
	Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab: a. Membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan tugas; b. Melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh Komisaris Utama; c. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris Utama; d. Wajib memastikan terselenggaranya penetapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;	



- e. Wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- f. Wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya;
- g. Wajib memberitahukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.

Rekomendasi Kepada Direksi:

- a. Meningkatkan kualitas SDM termasuk didalamnya optimalisasi AO dan Teknologi informasi agar kinerja PT BPR BKK DEMAK Perseroda Kabupaten Demak semakin efisien dan efektif;
- b. Melakukan langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan pengembalian penempatan dana pada PT BPR Bank Artha Jepara (Perseroda) dan upaya menghindari kerugian pada PT BPR BKK DEMAK Perseroda sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Menerapkan Strategi Anti Fraud (SAF) pada semua unit kerja, serta terus mensosialisasikan terkait risiko dan bahaya fraud terkait risiko kerugian bahkan sampai ke risiko reputasi bank atau kepercayaan nasabah terhadap PT BPR BKK DEMAK Perseroda Kabupaten Demak.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

Nihil

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

Tidak terdapat Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite.

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Sunoto, S.Kom.
	NIK	3321030607700005
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Sutopo, S.Sos. M.M.
	NIK	3309150701640002
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00



Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Wahyu Jaya Sembodo, S.E, M.M.
	NIK	3374010202690001
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Arief Sudaryanto, S.Sos., M.Si
	NIK	3321111805700003
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Nihil

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Sunoto, S.Kom.
	NIK	3321030607700005
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Sutopo, S.Sos. M.M.
	NIK	3309150701640002
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Wahyu Jaya Sembodo, S.E, M.M.
	NIK	3374010202690001
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun	0,00



	Sebelumnya	
2.	Nama	Arief Sudaryanto, S.Sos., M.Si
	NIK	3321111805700003
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

Nihil

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Sunoto, S.Kom.
	NIK	3321030607700005
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Sutopo, S.Sos. M.M.
	NIK	3309150701640002
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Wahyu Jaya Sembodo, S.E, M.M.
	NIK	3374010202690001
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Arief Sudaryanto, S.Sos., M.Si
	NIK	3321111805700003
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00



Nihil

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Sunoto, S.Kom.
	NIK	3321030607700005
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Sutopo, S.Sos. M.M.
	NIK	3309150701640002
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Wahyu Jaya Sembodo, S.E, M.M.
	NIK	3374010202690001
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Arief Sudaryanto, S.Sos., M.Si
	NIK	3321111805700003



Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Direksi tidak memiliki hubungan keuangan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang saham di PT BPR BKK DEMAK Perseroda Kabupaten Demak
Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang saham di PT BPR BKK DEMAK Perseroda Kabupaten Demak

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Sunoto, S.Kom.
	NIK	3321030607700005
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Sutopo, S.Sos. M.M.
	NIK	3309150701640002
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Wahyu Jaya Sembodo, S.E, M.M.
----	------	-------------------------------



	NIK	3374010202690001
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Arief Sudaryanto, S.Sos., M.Si
	NIK	3321111805700003
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dari anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang saham di PT BPR BKK PERSERODA DEMAK Kabupaten Demak
Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dari anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang saham di PT BPR BKK PERSERODA DEMAK Kabupaten Demak

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp177.539.040
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp71.015.616

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp577.638.756



Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp231.057.360

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp324.957.774
Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp152.607.115

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp125.862.966
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	2 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp50.345.186



2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
--	---------



Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Nihil

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah	
Rasio (a/b)	3,17 : 1
2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah	
Rasio (a/b)	1,25 : 1
3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	
Rasio (a/b)	1,25 : 1
4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	
Rasio (a/b)	2,50 : 1
5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi	
Rasio (a/b)	2,23 : 1

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	08 Januari 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
1. Pembahasan realisasi atas Capaian Desember 2024, Dewan Komisaris menghimbau Direksi untuk tahun 2025 dapat lebih fokus pada pos-pos yang perlu dievaluasi untuk dioptimalkan terutama pada penyaluran kredit dan penanganan NPL yang masih menjadi fokus yang sama dari tahun-tahun sebelumnya;		



2. Terhadap capaian kinerja tahun 2024 yang belum tercapai secara optimal malah lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya, hal tersebut menjadi perhatian barik Direksi beserta jajaran unit BPR BKK Demak untuk dievaluasi;
3. terkait RBB tahun 2025 yang telah dibuat dan disetujui, Direksi diminta nutk menentukan langkah- langkah strategis dan konkrit khususnya yang berkaitan peningkatan outstanding kredit dan penanganan NPL;
4. Terkait kepatuhan masing- masing unit kerja terhasap SOP yang sudah ada dan belum sepenuhnya ditaati berdasarkan temuan pemeriksa baik SKAI maupun dari pemeriksa pihak eksternal terkait operasional perusahaan untuk ditaati agar tidak menjadi catatan dan temuan yang sifatnya berulang dikemudian hari;
5. Kecermatan masing-masing pegawai terhadap Job Desc atau SOTK yang ada;
6. Direksi dan Bidang terkait untuk memaksimalkan sosialisasi terhadap ketentuan maupun SOP yang telah disahkan agar pelaksanaan ketentuan tersebut dapat dipastikan dalam operasional bank sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Direksi dan Bidang terkait diminta untuk menentukan strategi guna optimalisasi capaian RBB tahun 2025 yang telah disahkan salah satunya dengan memberikan insentif dan reward atas tercapainya target masing- masing indikator kinerja keuangan serta perlu ditambahkan punishment atas tidak tercapainya indikator keuangan guna memastikan tingkat rasionalitas atas tercapainya RBB sesuai dengan target yang ditentukan.

2.	Tanggal Rapat	21 Maret 2025
	Jumlah Peserta	2 orang

Topik/Materi Pembahasan:

1. Pembahasan realisasi atas Capaian Februari 2025, atas data capaian Februari 2025 Dewan Komisaris meminta Direksi agar mengkoordinis jajarannya agar lebih fokus pada pos-pos kinerja yang masih perlu untuk dioptimalkan serta dilakukan evaluasi terutama pada penyaluran kredit dan penanganan NPL serta dana yang masih menjadi tantangan kedepan;
2. Dewan Komisaris meminta kepada Direksi untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi masing- masing unit kerja terkait permasalahan yang dihadapi serta melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Dewan Komisaris terkait :
 - Temuan terkait kredit : Penyaluran kredit belum sepenuhnya memperharikan prinsip kehati- hatian, antara lain analisa belum dilakukan secara komprehensif sesuai dengan kebijakan dan PKPB dalam menilai kelayakan usaha, keuangan debitur untuk penyaluran kredit baru, pembaruan kredit, kredit large exposure;
 - Temuan terkait operasional : a. Pemahaman SDM terhadap ketentuan yang berlaku serta budaya risiko masih belum optimal yang tercermin dari adanya kekurangan dan kesalahan dalm administrasi baik kredit, slip, jurnal dan laporan yang terkoreksi; b. Penerapan prinsip kehati- hatian yang kurang maksimal dalam penyaluran kredit.
 - Temuan terkait Kepatuhan : a. Masih ada temuan berulang diantaranya kekurangan lengkapan penulisan slip setoran maupun penarikan serta tanda tangan baik pihak nasabah maupun pegawai bank; b. masih terdapat temuan terkait absensi pegawai yang tidak sesuai jam kerja operasional perusahaan.
 - Permasalahan terkait likuiditas : masih terdapat risiko likuiditas pada kantor cabang yang dinilai masih tinggi sehingga perlu dilakukan pengendalian dan rasio LDR yang belum optimal.



3.	Tanggal Rapat	29 September 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
- Menyikapi hasil pemeriksaan OJK tahun 2025 terkait POJK No 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Pasal 42 yang mewajibkan bank untuk memenuhi jumlah komisaris paling sedikit 3 orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, Jumlah Komisaris tersebut bank wajib memiliki Komisaris Independen paling sedikit 50% dari jumlah Anggota Dewan Komisaris. - Dampak lain belum terpenuhinya komposisi Dewan Komisaris diantaranya : Komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi. Sesuai dengan POJK No 9 tahun 2024 pasal 59 Dewan Komisaris pada BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 50 miliar wajib membentuk paling sedikit : Komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi. Pengurus akan tetap berkoordinasi dengan pemilik terkait respon atas surat permohonan tersebut. - SKMR menyampaikan laporan Manajemen Risiko mencakup efektivitas penerapan Kebjikana Manajemen Risiko dan diminta untuk menilai apakah penerapan Manajemen Risiko sudah sesuai dengan Risik Appetite dan Risk Tolerance Bank. - Mengingat masih adanya temuan berulang pada laporan audit intern, berkaitan dengan action plan yang dibuat oleh cabang tidak dijalankan dengan benar. SKAI diminta agar untuk terus memantau dan memberikan teguran/sanksi internal bila terdapat unit kerja yang masi berulang kali ditemukan temuan berulang.		
4.	Tanggal Rapat	16 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
Topik/Materi Pembahasan:		
- Pembahasan realisasi atas Capaian September 2025, atas data capaian September 2025 hal tersebut menunjukkan kondisi : kinerja kredit semakin menurun; laba yang masih jauh dari target yang diinginkan; kurang efektifnya kinerja bank terutama di sektor penyaluran kredit; kuran efektifnya kinerja bank dalam menjaga kualitas aktiva produktif. - Paparan dari SKMR terkait evaluasi risk appetite dan risk tolerance pada capaian RBB tahun 2025 bulan September 2025, hal ini menunjukkan bahwa rasio NPL gross dan NPL Netto saat ini melampaui batas risk appetite dan risk tolerance yang diteapkan dalam kerangka manajemen risiko. - NPL Gross tercapai 27,51%, menandakan proporsi kredit yang sudah masuk kolektibilitas rendah sangat besar, artinya banyak kredit mengalami masalah pembayaran sebelum mempertimbangkan cadangan, Penyebab utamanya karena lemahnya fungsi monitoring/ pengawasan pasca pencairan. kondisi ini bukan sekedar gangguan kualitas, ini sinyal sistematis pada proses pemberian kredit dan pengawasan portofolio. - NPL Netto tercapai 17,20% berarti setelah memperhitungkan CKPN, eksposur kredit bermasalah yang belum dilakukan pencadangan penurunan nilai masih sangat besar. ini menunjukkan bahwa cadangan yang tersedia belum mampu menyerap potensi kerugian secara memadai atau penentuan CKPN sebelumnya belum mencerminkan nilai pemulihan aktual. Bila NPL netto tetap tinggi, ini		



mencerminkan beban risiko bersih yang nyata, bukan hanya masalah akuntansi tetapi ancaman terhadap posisi modal dan kelangsungan laba.

Pelaksanaan rapat dalam hal ini rapat Dewan Komisaris jumlah peserta 2 (dua) orang.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Wahyu Jaya Sembodo, S.E, M.M.
	NIK	3374010202690001
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Arief Sudaryanto, S.Sos., M.Si
	NIK	3321111805700003
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

Tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris Utama dan Komisaris 100%

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus



Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus
---	----------------

1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
--------------------------------	----------------

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
-----------------------------------	----------------

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
---------------------------------------	----------------

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
--	----------------

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
---	----------------

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
---	----------------

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
--	----------------

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus
---	----------------

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
--------------------------------	----------------

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	1 kasus
-----------------------------------	----------------

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	1 kasus
---------------------------------------	----------------

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
--	----------------

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
---	----------------

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
---	----------------

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
--	----------------



Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus
---	----------------

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
--------------------------------	----------------

Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
-----------------------------------	----------------

Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
---------------------------------------	----------------

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
--	----------------

Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
---	----------------

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
---	----------------

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
--	----------------

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus
---	----------------

Terdapat 1 kejadian fraud yang dilakukan pihak internal dan telah ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
---	----------------

Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1 kasus
--	----------------

1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
---	----------------



Permasalahan Hukum Pidana yang
Dalam Proses Penyelesaian

1 kasus

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	04 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Bhidumas Polda Jateng
	Penjelasan Kegiatan	Himbauan Khamtibmas Menyambut Hari Raya Idul Fitri th 2025
	Jumlah (Rp)	Rp3.000.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	04 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	SSB Aswadja Noesantara
	Penjelasan Kegiatan	Sekolah Sepak bola Aswadja
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	04 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Forum Kamtibmas Indonesia
	Penjelasan Kegiatan	Sosialisasi Operasi Ketupat Candi 2025
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
4.	Tanggal Pelaksanaan	11 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Perbarindo DPD Jateng
	Penjelasan Kegiatan	Tanggap Darurat Bencana Banjir Pekalongan dan Sekitarnya
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
5.	Tanggal Pelaksanaan	18 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial



	Penerima Dana	PMI Kab Demak
	Penjelasan Kegiatan	Peduli Banjir Demak
	Jumlah (Rp)	Rp3.102.250
6.	Tanggal Pelaksanaan	18 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Gawani Indonesia
	Penjelasan Kegiatan	Bakti Sosial Gawani
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
7.	Tanggal Pelaksanaan	24 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Takmir Masjid Jami Baitul Muttaqin
	Penjelasan Kegiatan	Renovasi Masjid Jami Baitul Muttaqin Ds Tambakbulusan
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
8.	Tanggal Pelaksanaan	25 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	SMA N 2 Demak
	Penjelasan Kegiatan	HUT Ke 38 SMA N 2 Demak
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
9.	Tanggal Pelaksanaan	28 Februari 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Ditbinmas Polda Jateng
	Penjelasan Kegiatan	Himbauan Partisipasi Hari Raya Idul Fitri 1446H
	Jumlah (Rp)	Rp3.500.000
10.	Tanggal Pelaksanaan	30 April 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	SLB Negeri 1 Demak
	Penjelasan Kegiatan	Kegiatan SLB Negeri 1 Demak
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
11.	Tanggal Pelaksanaan	05 Maret 2025



	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Baznas Kab Demak
	Penjelasan Kegiatan	Siar Dakwah Baznas
	Jumlah (Rp)	Rp900.000
12.	Tanggal Pelaksanaan	05 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Dinas Pariwisata Kab Demak
	Penjelasan Kegiatan	Festival Megengan dan Kirab Budaya Kota Wali 2025
	Jumlah (Rp)	Rp2.950.000
13.	Tanggal Pelaksanaan	05 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	RSKW Demak
	Penjelasan Kegiatan	Kuis Ramadhan
	Jumlah (Rp)	Rp3.030.876
14.	Tanggal Pelaksanaan	12 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	KMPKP
	Penjelasan Kegiatan	Siraman Rohani Keagamaan dengan anak jalanan
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
15.	Tanggal Pelaksanaan	22 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Setda Provinsi Jateng
	Penjelasan Kegiatan	Fasilitas Armada mudik dan baik rantau 2025
	Jumlah (Rp)	Rp3.000.000
16.	Tanggal Pelaksanaan	22 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Yayasan Insan Akhlakul Karimah Indonesia
	Penjelasan Kegiatan	Kegiatan Ramadhan 1446H
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000



17.	Tanggal Pelaksanaan	22 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Yayasan Pendidikan Islam Irsyadul Hasan Demak
	Penjelasan Kegiatan	Zakat Mal
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
18.	Tanggal Pelaksanaan	22 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Langen Budaya Kadilangu
	Penjelasan Kegiatan	World Dance day 2025
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
19.	Tanggal Pelaksanaan	27 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab Demak
	Penjelasan Kegiatan	Pasar Murah Prampelan Sayung Demak
	Jumlah (Rp)	Rp9.163.000
20.	Tanggal Pelaksanaan	27 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Damkar Kab Deamk
	Penjelasan Kegiatan	Bakti sosial dan sosialisasi Pemadam api bagi Santri di Ponpes Assalam Bonangrejo
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
21.	Tanggal Pelaksanaan	27 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Upz Masjid Jami'al Ikhlash Trembul Demak
	Penjelasan Kegiatan	Zakat Mal Sodaqoh
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
22.	Tanggal Pelaksanaan	27 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Yayasan Faihatus Tempuran Demak



	Penjelasan Kegiatan	Zakat Infaq
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
23.	Tanggal Pelaksanaan	28 Maret 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Dinas Pertanian dan Pangan Kab Demak
	Penjelasan Kegiatan	Gerakan Pangan Murah Karangtengah dan Bintoro
	Jumlah (Rp)	Rp11.489.000
24.	Tanggal Pelaksanaan	11 April 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Sekretariat Daerah Kab Demak
	Penjelasan Kegiatan	Jalan Sehat hari jadi Demak ke 522 th 2025
	Jumlah (Rp)	Rp2.500.000
25.	Tanggal Pelaksanaan	30 April 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Dinas Ketenaga Kerja dan Perindustrian Kab Demak
	Penjelasan Kegiatan	Jalan Sehat hari Buruh Internasional 2025
	Jumlah (Rp)	Rp3.700.000
26.	Tanggal Pelaksanaan	21 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Organisasi Bersepeda Gosagi Demak
	Penjelasan Kegiatan	Hari Jadi Gosagi
	Jumlah (Rp)	Rp2.000.000
27.	Tanggal Pelaksanaan	28 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Desa Mijen
	Penjelasan Kegiatan	Sedekah Desa Mijen
	Jumlah (Rp)	Rp1.500.000
28.	Tanggal Pelaksanaan	28 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial



	Penerima Dana	Kelurahan Bintoro Demak
	Penjelasan Kegiatan	APITAN Kelurahan Bintoro
	Jumlah (Rp)	Rp1.000.000
29.	Tanggal Pelaksanaan	29 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Sekretariat Daerah Kab Demak
	Penjelasan Kegiatan	Hari Lanjut Usia Nasional 2025
	Jumlah (Rp)	Rp1.750.000
30.	Tanggal Pelaksanaan	30 Mei 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia Grebeg Besar 2025
	Penjelasan Kegiatan	Grebeg Besar 2025
	Jumlah (Rp)	Rp2.500.000
31.	Tanggal Pelaksanaan	18 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah
	Penjelasan Kegiatan	CSR Keterampilan Produktif Ds Purwosari Sayung
	Jumlah (Rp)	Rp20.000.000
32.	Tanggal Pelaksanaan	18 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Mushola At- Taqwa Bandungrejo Mranggen Demak
	Penjelasan Kegiatan	CSR Qurban Idul Adha 1446H
	Jumlah (Rp)	Rp25.000.000
33.	Tanggal Pelaksanaan	18 Juni 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	BPBD Kab Demak
	Penjelasan Kegiatan	CSR Peduli Banjir Ds Kembangan Bonang Demak
	Jumlah (Rp)	Rp5.466.625



34.	Tanggal Pelaksanaan Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) Penerima Dana Penjelasan Kegiatan Jumlah (Rp)	19 Juni 2025 01. Kegiatan Sosial Dispermadesdukcakil Provinsi Jawa Tengah CSR Penanganan Banjir Rob Rp10.000.000
35.	Tanggal Pelaksanaan Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) Penerima Dana Penjelasan Kegiatan Jumlah (Rp)	25 Juni 2025 01. Kegiatan Sosial Kemitraan Wedung AdiLuhung 2025 CSR Wedung AdiLuhung 2025 Rp1.000.000
36.	Tanggal Pelaksanaan Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) Penerima Dana Penjelasan Kegiatan Jumlah (Rp)	25 Juni 2025 01. Kegiatan Sosial PBSI Pengurus Kabupaten Demak CSR Bulu tangkis Piala Bupati 2025 Rp2.500.000

Terdapat 36 Pelaksanaan CSR untuk Kegiatan Sosial PT BPR BKK DEMAK Perseroda Kabupaten Demak pada Tahun 2025.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR BKK DEMAK PERSERODA KABUPATEN DEMAK untuk tahun 2025. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Demak, 17 April 2026

PT BPR BKK DEMAK PERSERODA KABUPATEN DEMAK



WAHYU JAYA SEMBODO, S.E., M.M
Komisaris Utama



SUNOTO, S. Kom
Direktur Utama